



ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PADA KEBIJAKAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV JAWA BARAT

Hilman Akhmad Sadikin¹, Hinggil Permana², Chairil Fajar Hardiansyah³, Rafif Zaki Rabbani⁴,
 Ridho Anugerah Putera⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: hilmanakhmadsadikin@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2273>

Sections Info

Article history:

Submitted: 11 April 2026
 Final Revised: 23 April 2026
 Accepted: 16 May 2026
 Published: 27 June 2026

Keywords:

Multicultural Education
 Sustainable Development Goals
 Inclusivity
 Education Policy



ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in multicultural education policies at the Regional Education Office Branch IV in West Java. This study employs a qualitative approach through field research, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed using a descriptive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the West Java Regional Education Office IV has integrated the values of diversity, equity, and inclusivity through multicultural-based curriculum policies, teacher training programs, and social programs such as Poe Ibu (Sapoe Sarebu), which strengthen cross-cultural social solidarity. However, this study found several major challenges, such as uneven distribution of educational facilities, uneven teacher capacity, and a weak policy evaluation system. Overall, the implementation of multicultural education policies in the West Java Regional Education Office IV has proven to make a positive contribution to the achievement of SDG 4 and SDG 10.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada kebijakan pendidikan multikultural di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil diperoleh kemudian di analisis melalui model analisis deskriptif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan inklusivitas melalui kebijakan kurikulum berbasis multikultural, program pelatihan guru, dan program-program sosial seperti Poe Ibu (Sapoe Sarebu) yang memperkuat solidaritas sosial lintas budaya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan utama seperti fasilitas pendidikan yang tidak merata, kapasitas guru yang tidak seimbang, dan sistem evaluasi kebijakan yang lemah. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian SDG 4 dan SDG 10.

Kata kunci: Pendidikan Multikultural, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Inklusivitas, Kebijakan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan berkelanjutan sangat ditekankan secara global melalui kerangka SDGs yang memuat 17 tujuan. Secara spesifik, SDG 4 menegaskan perlunya negara untuk menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua serta mendorong peluang belajar sepanjang hayat. SDG 10 juga menekankan perlunya negara untuk mengurangi ketimpangan, baik di dalam negeri maupun antar negara, termasuk melalui upaya memperluas akses layanan pendidikan yang merata (Asad, 2023)

Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan telah disusun untuk menanggapi tantangan akses, mutu, dan keadilan. Menurut laporan tengah periode SDG 4, Indonesia telah mengimplementasikan hampir 9 tahun wajib belajar dan menaikkan lama sekolah. (Sala & Subriadi, 2023) Namun, masih terdapat berbagai masalah signifikan seperti kualitas pembelajaran yang belum merata, kesenjangan antar daerah dan kelompok sosial, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja (Riris et al., 2023) Di sisi lain, sebuah studi mengenai pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah terpasang dengan lengkap, implementasinya di lapangan, terutama bagi kelompok minoritas atau dengan latar belakang budaya berbeda, masih dihadapi dengan berbagai hambatan yang signifikan (Fuad et al., 2025)

Konteks multikultural dalam bidang pendidikan menjadi sangat esensial ketika budaya, agama, suku, dan latar belakang hadir dalam realitas kehidupan bersama kita, termasuk di wilayah Jawa Barat. Pendidikan multikultural tidak hanya berkaitan dengan keberagaman isi, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan, program, dan mekanisme yang menjamin akses dan keterlibatan setara dari semua kelompok dalam dunia pendidikan. Lebih banyak kajian mencatat bahwa ketika keadilan, inklusivitas, dan aspek keberagaman tidak dipertimbangkan dalam kebijakan, pendidikan gagal memperbaiki kondisi kelompok terlemah (Madhakomala et al., 2025)

Lebih lanjut, terdapat sinergi penting antara agenda SDG 4 dan SDG 10 dalam ranah pendidikan, jika pendidikan berkualitas hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, ketimpangan akan terus berlangsung atau bahkan semakin memburuk. (Amirudin & Putra, 2023) Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan pendidikan multikultural dapat mengukur sejauh mana kebijakan di tingkat provinsi/cabang dinas di Jawa Barat dapat merentangkan dua aspek SDG, yaitu SDG 4 “pendidikan berkualitas” dan SDG 10 “pengurangan ketimpangan”. Daerah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat memiliki karakteristik yang unik, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang dicirikan oleh keragaman sosial-budaya serta ketidakmerataan dalam distribusi layanan pendidikan di kota/kabupaten. Selain itu, faktor geografis, ekonomi, dan budaya turut mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan multikultural (Sibaweh et al., 2024) Mengingat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat mewakili wilayah yang padat penduduk, yaitu meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang yang dimana wilayah ini menjadi studi yang relevan untuk mempelajari implementasi SDGs secara praktis. Apabila implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dapat dianalisis secara cermat dengan memahami para pelaku, proses, tantangan, serta arti penting bagi hak belajar anak-anak dari latar belakang beragam maka hal tersebut dapat membentuk dasar yang kokoh untuk rekomendasi kebijakan yang konkret terkait SDG 4 dan SDG 10. Kegagalan atau ketimpangan dalam implementasi akan menunjukkan bahwa kendati terdapat dasar hukum, namun manfaatnya terbatas. (Sari et al., 2024)

Penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, walaupun telah banyak kajian mengenai SDG 4 untuk sektor pendidikan di Indonesia, masih sedikit yang membahas isu ketimpangan SDG 10. Integrasi yang komprehensif antara pendekatan pendidikan multikultural dan kerangka SDG 4 dan SDG 10 jarang dilakukan secara mendalam, terutama di tingkat cabang dinas pendidikan provinsi. Oleh sebab itu, aspek ketiga yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu nilai lembaga terhadap SDG 4 dan SDG 10, memberikan nilai tambah dalam menggali tiga aspek tersebut. Kehadiran lembaga pendidikan seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, di tingkat cabang dinas provinsi, sangat penting. Menurut data dari (Kemendikdasmen, 2026) menunjukkan bahwa masih adanya masalah terkait peningkatan skor rata-rata nasional. Di wilayah timur, 3 dari 5 anak masih terdapat kesulitan dalam memahami teks sederhana dan memecahkan masalah terkait soal matematika dasar sehingga kerap terjadi perundungan antar siswa yang menyebabkan penurunan indeks karakter, iklim keamanan, dan iklim kemerdekaan. Jika lembaga-lembaga tersebut tidak turut serta dalam menerjemahkan kebijakan pedagogis ke dalam praktik yang efektif, kemungkinan terjadi ketimpangan akses dan pencapaian akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan dengan tujuan agar lembaga pendidikan seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat memiliki potensi untuk mempengaruhi semua sub tujuan SDG dan SDGs nasional. Kebijakan yang berkualitas belum tentu adil atau merata, kecuali apabila secara aktif memberikan dampak yang mengurangi ketimpangan. (Siahaan et al., 2023)

Dari konteks dan urgensi yang telah disebutkan, maka permasalahan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut: "Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan multikultural oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat berdampak pada pencapaian SDG 4 dan SDG 10?" Ditemukan beberapa sub-permasalahan, antara lain: bagaimana formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat? Apa hambatan yang dihadapi dalam memastikan pendidikan bermutu dan inklusif bagi semua kelompok sosial dan budaya? Bagaimana peran dan konteks lokal dari aktor seperti kabupaten/kota, sekolah, dan masyarakat dalam proses implementasi? Dan sejauh mana upaya ini dapat dianggap memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan akses, mutu, serta partisipasi pendidikan? Pertanyaan ini menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan penelitian kualitatif yang mendalam, karena hanya melalui pendalaman tersebut lah kita dapat melihat dinamika, persepsi, hambatan, keunggulan, dan peluang yang terjadi dalam implementasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. dengan jenis penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk mendeskripsikan dengan teliti dan terstruktur bagaimana implementasi kebijakan pendidikan multikultural dengan pendekatan desakan dilakukan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan 4 dan 10 (Wicaksono, 2025). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan dapat memahami implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks lokal, termasuk makna dan persepsi masyarakat, tindakan pelaku kebijakan, serta hambatan dan peluangnya, tanpa melakukan manipulasi variabel. Oleh karena itu, prosedur penelitian ini dapat direplikasi dan hasilnya dapat direproduksi oleh peneliti lain dalam situasi yang serupa. (Sala & Subriadi, 2023)

Fokus penelitian ini tidak terletak pada angka statistik itu sendiri, tetapi pada narasi,

persepsi, dan pengalaman secara materi dan langsung dari para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti merumuskan konsep realitas sosial melalui proses interaktif data muncul, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif deskriptif lebih sering digunakan dalam penelitian kebijakan pendidikan terkait integrasi SDGs 10 dan 4 di Indonesia (Waruwu, 2024) Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Wilayah kerja ini dipilih karena tingkat keragaman sosial dan budayanya, termasuk tantangan kedudukan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga tepat untuk menjadi konteks implementasi edukasi multikultural dalam konsep SDG 4 dan SDG 10. (Siahaan et al., 2023)

Sasaran penelitian adalah kebijakan, program, dan implementasi pendidikan multikultural di Cabang Dinas, terutama aspek kebijakan dan aspek satuan pendidikan. Subjek penelitian terdiri dari kepala cabang dinas, pejabat bidang kurikulum dan kesetaraan, kepala sekolah, guru, dan siswa dari 3 sekolah di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu kebijakan pemilihan informan berdasarkan beberapa pertimbangan serta keterlibatan, relevansi, dan kedalaman pengalaman. (Hasibuan, 2025.)

Beberapa langkah utama dalam prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah fase persiapan, yang melibatkan penyusunan proposal, permohonan izin penelitian, serta uji coba instrumen wawancara dan observasi. Langkah kedua adalah proses pengumpulan data, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Tahap ketiga adalah analisis data, yang dilakukan secara berulang dan interaktif, dimulai dari transkrip wawancara, reduksi data, pengkodean, kategorisasi, hingga pengambilan kesimpulan. yang mencakup empat aspek utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Seluruh data yang ditemukan dikategorikan secara signifikan ke dalam empat kategori berikut: (1) kebijakan pendidikan multikultural, (2) strategi implementasi kebijakan, (3) hambatan dan tantangan, dan (4) kontribusi kebijakan terhadap SDG 4 dan SDG 10. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan ke dalam kerangka teoritis pendidikan multikultural dan prinsip keadilan sosial dalam SDGs (Sibarahi, 2025)

Untuk memastikan keandalan dan validitas penelitian, peneliti melakukan pengecekan pada informan, menjaga catatan audit trail untuk memantau proses penelitian, dan mengumpulkan semua dokumen pendukung secara sistematis agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Selain itu, prinsip etika penelitian ditegakkan dengan memberikan informed consent kepada seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan memastikan data hanya digunakan untuk tujuan ilmiah semata. Dengan pendekatan yang terstruktur, deskripsi bahan yang detail, dan analisis yang sistematis, artikel ini menjadi dapat diulang dan direproduksi, sehingga peneliti lain dapat mengulanginya dalam konteks yang berbeda. (Udar et al. 2024), Pemikiran kualitatif deskriptif yang mengacu pada SDG 4 dan SDG 10 diharapkan dapat saling bersinergi melalui artikel ilmiah ini dalam literatur kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia. Integrasi antara SDG dengan manajemen pendidikan daerah menjadi fokus utama yang ditekankan. (Fahreza et al., 2025)



Gambar.1 Langkah-Langkah Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV adalah sebuah unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini mengawasi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki ciri khas sosial-kultural dan ekonomi yang beragam. Di satu sisi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat bertanggung jawab terhadap daerah industri dan perkembangan perkotaan, sementara di sisi lain, wilayahnya juga mencakup desa-desa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur pendidikan. Pluralitas ini jelas menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman.



Gambar 2. Lokasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat

Dari perspektif fungsional kelembagaan, peran strategis Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV terletak pada koordinasi program pendidikan menengah dan kejuruan, pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan mutu layanan pendidikan dalam wilayah kerjanya. Pemetaan peran tersebut

diharapkan dapat semakin strategis dan mendukung arah pembangunan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional, sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek akses, mutu, dan keadilan pendidikan.

Dari perspektif situasi awal, dapat dikemukakan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV juga sedang menghadapi disparitas yang signifikan, contohnya dalam hal distribusi guru berpendidikan, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta hak akses siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang lemah terhadap pendidikan menengah atau kejuruan. Dalam konteks ini, sinergi antara kebijakan provinsi dengan implementasinya di tingkat Cabang Dinas merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan ekonomi, kebijakan pendidikan multikultural dan upaya pencapaian SDGs menjadi relevan sebagai strategi integratif demi memastikan bahwa pendidikan menjadi inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh pihak (Hadi et al., 2024)

Kebijakan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dalam konteks Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dimaknai sebagai sebuah rangkaian kebijakan dan praktik di mana segala kebijakan dihormati oleh masyarakat baik suku, budaya, agama, maupun latar belakang sosial-ekonomi serta setiap peserta didik diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang (Hutapea, 2024) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah menciptakan kebijakan seperti kurikulum yang bernilai toleransi dan pluralisme, pelatihan guru yang berbasis pendidikan multikultural, serta kegiatan lintas budaya dan komunitas di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, kebijakan ini didukung oleh inisiatif program provinsi dengan aspek sosial dan nilai bersama yang kuat Program Sapoe Sarebu seribu rupiah setiap hari yang dirancang oleh gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan digalang melalui gerakan Poe Ibu (Sapoe Sarebu). Berdasarkan sumber dari (Diskominfo Purwakarta, 2025) Program ini merupakan upaya untuk mendorong seluruh aparat pemerintah, guru, dan siswa di sekolah-sekolah untuk menyisihkan uang sebesar Rp 1.000 setiap harinya secara bersamaan dan berkelanjutan demi infaq atau sumbangan yang jumlahnya jika digabungkan sangat besar guna memperkuat semangat Gotong Royong dan kepedulian sosial.



Gambar 3. Program Poe Ibu (Sapoe Sarebu)

Dalam konteks pendidikan multikultural, program Poe Ibu (Sapoe Sarebu) menjadi semakin relevan. Pertama, program ini mempromosikan solidaritas di antara individu dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Melibatkan siswa, guru, dan ASN dari berbagai suku, agama, dan kondisi ekonomi dalam kegiatan infaq harian membantu memperkuat relasi sosial yang lebih inklusif dan merata. Kedua, program ini tidak hanya

menekankan transfer pengetahuan teknis, tetapi juga karakter dan nilai-nilai sosial universal, sesuai dengan esensi pendidikan multikultural (Amin, 2024) Ketiga, program ini mencerminkan integrasi kebijakan lokal dengan tujuan global seperti SDGs. Melalui langkah-langkah sederhana seperti infaq harian, kesadaran kita akan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan institusi sebagai pelaku sosial.

Secara operasional, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat melakukan tindakan-tindakan implementasi kebijakan multikultural dengan menyusun pedoman internal untuk sekolah yang mencakup nilai-nilai keberagaman dan inklusi, mengadakan lokakarya guru berbasis tema multikultural dan keragaman budaya lokal, mendorong aktivitas antar-budaya di sekolah, seperti pertukaran antar sekolah desa dan kota dalam wilayah, dialog keberagaman antar siswa, dan proyek kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta suasana inklusif di sekolah, di mana para siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang setara.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan multikultural tidak dapat dilaksanakan dalam kekosongan ruang. Dengan kata lain, untuk menjadikan kebijakan tersebut efektif, kerangka regulasi baik di tingkat nasional maupun provinsi harus diintegrasikan dengan hal-hal yang spesifik pada konteks lokal, seperti kebudayaan Sunda, masyarakat industri, komunitas desa, dan setiap individu. Seperti yang dinyatakan dalam literatur, pendidikan multikultural di Indonesia harus mencakup kemampuan guru dalam mengembangkan persepsi, sikap, dan perilaku yang lebih toleran dan sensitif agar dapat dikuasai dengan lebih efisien, seolah-olah hal tersebut mampu mengubah proses pembelajaran itu sendiri.

Implementasi SDG 4 dalam Pendidikan Multikultural

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dijalankan melalui berbagai strategi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis inklusivitas. Pada intinya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 4 menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa 'tidak ada satupun anak yang tertinggal' dalam mengejar pendidikan berkualitas. Di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, prinsip tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemerataan pendidikan menengah, penguatan sekolah inklusif, dan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola keragaman di kelas. Contohnya, banyak sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan tema budaya lokal, lingkungan alam, dan masyarakat. Peserta didik terlibat dalam proyek-proyek seperti pengembangan budaya Sunda, diskusi lintas agama, atau kegiatan kolaborasi antara desa dan kota yang mempromosikan toleransi serta membantu peserta didik memahami realitas sosial di sekitar mereka. Upaya ini tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga membentuk keterampilan sosial yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari segi peningkatan mutu pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat juga turut serta dalam melatih guru dengan pendekatan multikultural. Tujuan dari program yang diikuti oleh sebagian besar guru adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator keberagaman dengan memberikan pelatihan yang di sengaja untuk tujuan tersebut. Pelatihan tersebut difokuskan pada peningkatan kesadaran budaya, komunikasi lintas budaya, serta strategi pembelajaran inklusif. Dengan meningkatnya keterampilan guru di bidang ini, proses pembelajaran di tingkat sekolah menjadi lebih bersahabat bagi siswa dari latar belakang yang beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati et al., 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola perbedaan secara adil untuk mencegah terjadinya diskriminasi tersembunyi di dalam kelas. Bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, keberadaan guru-guru yang memiliki kesadaran tersebut membantu mengatasi konflik sosial di antara siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang adil.



Gambar 3. Pelatihan Guru Melalui Pendekatan Multikultural

Implementasi SDG 10 dalam Pendidikan Multikultural

Tujuan SDG 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam dan antar masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini diinterpretasikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat melalui kebijakan afirmatif yang difokuskan pada pelayanan kelompok rentan. Sebagai contoh, penyebaran guru dan tenaga kependidikan ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas menjadi prioritas. Program ini juga mencakup insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil serta peningkatan fasilitas sekolah berbasis sumber daya. Di samping itu, terdapat program-format sosial yang berbasis pendidikan, seperti Poe Ibu (Sapoe Sarebu), yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan. Setiap hari, sejumlah Rp. 1.000 dari setiap Aparatur Sipil Negara, guru, dan akademisi dikumpulkan dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Hal ini digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu, menyelenggarakan kegiatan sosial di sekolah, serta membantu renovasi fasilitas fisik di sekolah terpencil. Secara simbolis, program ini menggambarkan bahwa pengurangan ketimpangan merupakan tanggung jawab bersama negara dan seluruh komunitas pendidikan.

Implementasi SDG 10 dalam konteks pendidikan dicapai melalui upaya membentuk budaya sekolah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Pendidikan multikultural menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan kelas sosial, gender, atau etnis. Melalui proses pembelajaran dan kehidupan di lingkungan sekolah, generasi muda diajarkan serta diberi kesempatan untuk melihat beragam individu dan perbedaan dengan pengalaman yang mereka dapatkan (World bank, 2021) Mereka diajarkan untuk tidak melihat perbedaan

sebagai hal yang memisahkan, namun sebagai sesuatu yang memperkaya. Salah satu cara terbaik untuk saling bertukar pengalaman adalah melalui interaksi antara sekolah kota dan sekolah desa. Beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, telah menerapkan tradisi mengundang siswa dari sekolah desa untuk berbagi pengalaman. Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa tentang realitas sosial yang beragam, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya empati lintas budaya. Meningkatkan empati terhadap kelompok lain tidak hanya berarti membangun solidaritas sosial, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terasa and emosional. Dengan demikian, SDG 10 menjadi bagian integral dari pendidikan multikultural yang efektif dalam membentuk masyarakat yang egaliter dan adil secara sosial.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan praktik oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, terdapat sejumlah kendala dan permasalahan nyata yang perlu diselesaikan dalam implementasi pendidikan multikultural sesuai dengan SDG 4 dan SDG 10. Beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain: pertama, ketimpangan dalam infrastruktur dan sumber daya. Lebih spesifik lagi, beberapa sekolah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, masih kekurangan fasilitas pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan internet. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas pembelajaran dan akses yang lebih luas. Keadaan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip SDG 4 dan 10 yang menekankan pentingnya inklusi dan keadilan bagi semua. Para tenaga pendidik seharusnya menunjukkan sikap yang lebih inklusif agar menjadi contoh bagi para siswa. Kedua, kompetensi guru dan staf dalam konteks multikulturalisme dalam organisasi, pengajaran, dan pelayanan siswa juga menjadi salah satu permasalahan. Meskipun para guru telah menerima pelatihan berdasarkan pendekatan baru, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu mengimplementasikannya secara konsisten. Sebuah studi dalam literatur menyatakan bahwa guru-guru yang memiliki pandangan terbatas akan mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari mereka. Hal ini merupakan tantangan yang bersifat sistematis dan menunjukkan perlunya penyegaran pengetahuan tentang interaksi dalam sistem secara menyeluruh.

Kendala lainnya meliputi resistensi budaya yang tersirat, kecenderungan stereotip, serta faktor non-struktural yang menghambat aksesibilitas dan mengisolasi kelompok tertentu. Hal ini secara tidak sistematis mempengaruhi proses internalisasi dan pembelajaran. Terakhir, terdapat kekurangan dalam pengawasan dan evaluasi yang memadai. Penanda pengukuran merupakan salah satu tantangan karena belum tersedia mekanisme yang sistematis untuk mengumpulkan data.

Seluruh SDG menghadapi tantangan yang signifikan antara negara-negara bagian. Studi kasus tentang kendala-kendala ini seperti denyut yang menandakan masalah pada batas perguruan tinggi terjadi secara tiba-tiba. Kurangnya sumber daya atau dukungan keuangan juga menjadi isu yang kerap dihadapi.

Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi kemajuan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung telah berhasil memperkuat pelaksanaan pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Di antaranya adalah:

Pertama, komitmen dan kebijakan pimpinan daerah; dukungan dari tingkat provinsi dan daerah seperti program Poe Ibu/Sapoe Sarebu, yang menunjukkan legitimasi politik yang kuat terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan multikultural dan inklusif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan dukungan kebijakan dari tingkat pemerintahan hingga implementasi di tingkat sekolah dan komunitas. Kedua, partisipasi aktif masyarakat dan komunitas, orangtua, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan budaya lokal yang terlibat dalam kegiatan sekolah membentuk lingkungan sekolah yang mendorong nilai-nilai keberagaman. Ketiga, Pengintegrasian nilai lokal dan budaya ke dalam pembelajaran. Di Wilayah Jawa Barat khususnya, kearifan lokal digunakan sebagai elemen kunci dalam pendidikan multikultural. Integrasi antara kearifan lokal ini dalam pembelajaran memungkinkan murid untuk dengan mudah menginternalisasi nilai-nilai keberagaman dan inklusi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan multikultural yang efektif menjadikan kearifan lokal sebagai landasan yang kuat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. (Japar et al., 2022) Keempat, Keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat, terutama nilai-nilai budaya Sunda yang mencakup prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, bertemunya tiga prinsip atau saling kunjung, menghormati satu sama lain, dan mencintai satu sama lain di dalam masyarakat Sunda sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan dasar dari multikulturalisme modern dan memperkuat identitas partisipasi individu peserta didik sebagai individu yang memahami sesamanya. Dan faktor keempat melibatkan pembentukan jejaring antar sekolah dalam aktivitas proyek sosial, seperti kolaborasi dengan pertukaran siswa atau kegiatan kemasyarakatan lintas wilayah. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dapat belajar secara mendalam dan khusus mengenai perbedaan-perbedaan sosial, budaya, ekonomi, serta konsep solidaritas yang nyata.

Analisis Kesesuaian dengan Target SDGs

Tingkat kesesuaian kebijakan dan praktik pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dengan target SDGs, secara keseluruhan, menunjukkan tingkat kecocokan yang tinggi secara substansial. Dari perspektif SDG 4, program akses, pelatihan guru, kurikulum berbasis budaya, dan karakter siswa memenuhi prinsip pendidikan yang berkualitas dan inklusif pada aspek kebijakan tersebut. Pendidikan tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial dan pola pikir siswa. Dari SDG 10, upaya asimilasi sekolah-sekolah tertinggal dan partisipasi sosial melalui program Sapoe Sarebu, mencerminkan langkah konkret dalam mengurangi ketimpangan pendidikan dan sosial ekonomi pengguna jasa. Meskipun demikian, kecocokan tersebut masih berupa konseptual. Secara empiris, belum semua indikator SDGs dapat diukur. Sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data ilmiah kronologis diperlukan agar kontribusi edukasi terhadap pencapaian SDGs dapat diukur secara tepat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah berhasil menerapkan praktik terbaik dalam pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam program pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keberagaman, lembaga ini telah berhasil menyeimbangkan kontribusinya menuju pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Namun, agar praktik ini dapat berlanjut, diperlukan tiga solusi penting. Pertama, diperlukan konsolidasi kelembagaan untuk memastikan bahwa kebijakan multikultural diintegrasikan

sebagai satu kebijakan institusi dan tidak hanya bergantung pada kepala sekolah, tetapi juga pada budaya kerja yang dianut oleh organisasi. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus dan kegiatan instruksi yang melibatkan aspek budaya dan etnosentris. Terakhir, konsorsium antara sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diinisiasi untuk mendukung kelangsungan program multikultural dan aspek sosial seperti yang diwujudkan oleh Program Poe Ibu (Sapoe Sarebu). Dengan demikian, implementasi SDG 4 dan 10 tidak hanya menjadi slogan kebijakan belaka, melainkan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan multikultural oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah mencapai arah yang berpotensi tercapai dalam mengurangi parameter keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan tujuan Sustainable Development Goals, terutama SDG 4 dan SDG 10.

REFERENSI

- Abacioglu, C., Volman, M., & Fischer, A. (2019). Sikap multikultural guru dan kemampuan pengambilan perspektif sebagai faktor dalam pengajaran yang responsif secara budaya. *The British Journal of Educational Psychology*, 90, 736-752. <https://doi.org/10.1111/bjep.12328>
- Amirudin, T., & Putra, B. P. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Proses Pelayanan di Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 197-205. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2526>
- Ananda, Ahmad, A., Januarta, Reyhan S. S, R., Wahyudi, (2025) 'MENCIPTAKAN IKLIM SEKOLAH POSITIF', 1-10
- Asad, Al, (2024)'SDG 4 Mid Term Review Report Indonesia'
- Correa, Mariano, Santos (2025) *Sustainability*, 17(13), 5677; <https://doi.org/10.3390/su17135677>
- D'hondt, F., Maene, C., Vervaet, R., Van Houtte, M., & Stevens, P. (2021). Diskriminasi etnis dalam pendidikan menengah: Apakah solusinya terletak pada pendidikan multikultural dan komposisi etnis sekolah?. *Psikologi Sosial Pendidikan*, 24, 1231-1258. <https://doi.org/10.1007/s11218-021-09651>
- Deswita Elisabeth Situmenang, Khodijah Ismail, Merliana Marchelina Hawa (2021), 'PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030 Goals 4 ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY EDUCATION AND PROMOTE LIFELONG LEARNING PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030 Goals 4 ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY EDUCATION AND PROMOTE LIFELONG LEARNING OPPORTUNI' <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11219.96809>
- Fahreza, M., Umarella, A., Naisyarah, W., & Zainur, R. A. (2025). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BUKU TAMU DIGITAL BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA KOTA KENDARI). 9(6), 9247-9253.
- Fuad, Muhammad, Zaini Siregar, Afifah Nurul, Khoirot Nasution, Bambang Lestrika Budimayansah, and Ira Wirtati (2025) *Manajemen Pendidikan Multikultural: Landasan, Konsep, Dan Manajemen Dalam Menata Keberagaman*.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2023). Pembangunan inklusif, tidak meninggalkan siapa pun di belakang, keadilan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Perjanjian Lingkungan*

- Internasional: Politik, Hukum dan Ekonomi, 23, 115 - 121.
<https://doi.org/10.1007/s10784-023-09612-y>
- Hadi, Hairul, Warni Djuita, and Fathurrahman Muhtar (2024) Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Resolusi Konflik Etnis', 9, 148–59
- Hasanuddin, Hikmah, 'Konsep Kebijakan Dan Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia', 9 (2024), 31–43
- Hasibuan, M. I. (n.d.). REALIZING QUALITY EDUCATION AS A GOAL OF THE SDGs IN INDONESIA. Retrieved <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Hutapea, Bonar M.Psi (2024) Keberagaman, Inklusi, Dan Pelatihan Multikultural Di Tempat Kerja.4
- Japar, M., Fadhillah, D. N., Komin, W., Kardiman, Y., Triyanto, T., & Sarkadi, S. (2022). The implementation of multiculturalism learning model based on local wisdom in civic education. *Jurnal Civics: Mdia Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 186–195.
<https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53547>
- Lawitta, Riris, M., Siahaan, J., Arianti, and Najdah Thalib, 'PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA : ANALISIS SDGs 4', 2023, 975–85
- López-Villena, P. (2024). Pengaruh Perspektif Dokumen dalam Hubungan antara Pendidikan dan Masyarakat. *YUYAY: Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas*.
<https://doi.org/10.59343/yuyay.v3i1.58>
- Maulana, Iqbal Rizky, (2025) 'Kesenjangan Sosial Dalam Distribusi Kekayaan: Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan', 1–12
- Madhakomala, R., Ayu, P., Septiani, T., & Butarbutar, H. (n.d.). Education for All: A Systematic Analysis of Equity Policies and Challenges in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 4(4), 1706–1717. Retrieved <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Philosophy, Educational, Yusuf Hadijaya, Farida Isnaini, Islam Negeri, and Sumatera Utara, 'Alacrity : Journal Of Education Dimensi Multikultural Dalam Pengawasan Lembaga Pendidikan 1,2,3', 5 (2025), 314–24
- Purwakarta, Diskominfo, 'Ketika Sapoe Sarebu Mengukir Jutaan Harapan Di Jawa Barat', Purwakarta.go.id, 2025 <https://purwakartakab.go.id/read/3155>
- Putri, Yati Rasma, Afifah Salma B, Izzatuz Zahra El-fadhla, and Anggia Elisma, 'Langkah-Langkah Penyusunan Proposal Penelitian Pendidikan', 2025, 882–96
- Sala, E. E., & Subriadi, A. P. (2023). Hot-Fit Model to Measure the Effectiveness and Efficiency of Information System in Public Sector. *The Winners*, 23(2), 131–141.
<https://doi.org/10.21512/tw.v23i2.7423>
- Sari, Erika, Riri Marfilinda, and Ady Ferdian Noor (2024)'Sustainable Development 2030: Primary School Education Policy Based on Multicultural Education', *International Journal of Universal Education*, 2, 130–36. <https://doi.org/10.33084/ijue.v2i2.9152>
- Siahaan, R. L. M., Juli Arianti, & Thalib, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975–985.
<https://doi.org/10.54373/imej.v4i2.316>
- Sibarani, Nur Hafiza, and Meyniar Albina (2025)'Etika Dalam Penelitian Pendidikan', 2, 10–22
- Sibaweh, Imam, Deny Setiawan, and Mohamad Erihadiana (2024) Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa, 13, 3895–3904

- Sulistyowati, Cicik, & U., Radiana, (2024) Peningkatan Mutu Pendidikan Dengan Penerapan Kurikulum Merdeka Untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goal, 7, 12706-12
- Udar, M., Bin (2024) Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif : Metode Verifikasi Dan Implementasinya
- Waruwu, Marinu (2024) Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan, 5, 198-211
- Wicaksono, T., Arreza (2025) Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Membangun Kerukunan Antar Umat Di Sman 5 Dan Smkn 5 Kota Madiun Tesis Beragama.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA